

REFORMASI BIROKRASI KONSTEKTUAL: KEMBALI KE JALUR YANG BENAR



**Judul : Reformasi Birokrasi Konstektual:
Kembali ke Jalur yang Benar**
Penulis : Agus Dwiyanto
Penerbit : UGM Press
Tahun terbit : 2015
Jumlah halaman : i-xv + 307
ISBN : 978-979-420-981-31412269-C1E



Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan Prof. Agus Dwiyanto melihat perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia yang belum mampu mewujudkan tujuan dari reformasi birokrasi itu sendiri. Reformasi Birokrasi di Indonesia telah dilaksanakan pemerintah Indonesia semenjak tahun 2010. Namun hingga saat ini, program reformasi birokrasi yang diatur melalui Perpres No. 81 Tahun 2010 tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Penulis melihat bahwa reformasi birokrasi di Indonesia malah terperangkap dalam generalisasi, dan formalitas.

Buku ini menyajikan perspektif yang berbeda dalam mengkaji reformasi birokrasi. Jika selama ini buku reformasi birokrasi lebih banyak bercerita tentang konsep reformasi birokrasi dan cara-cara yang dilakukan dalam melakukan reformasi birokrasi, seperti perampingan struktur, debirokratisasi, penyederhanaan prosedur, buku ini justru lebih kepada membahas tentang kritikan terhadap model reformasi birokrasi yang selama ini diterapkan di Indonesia.

Kelemahan Birokrasi Weberian

Menurut penulis, reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Indonesia sejauh ini *"masih jauh panggang dari pada api"* dan cenderung salah kaprah. Penulis mencoba menganalisis dan mengupas secara tajam faktor-faktor yang mempengaruhi salahnya arah reformasi birokrasi yang dijalankan di Indonesia. Mulai dari penerapan Model Birokrasi Weberian/ Birokrasi Ideal dalam birokrasi Indonesia yang dipandang terlalu berlebihan, sejarah desentralisasi kekuasaan, budaya paternalistik yang cenderung masih berkembang di masyarakat, hingga belum jelasnya visi pembangunan birokrasi di Indonesia. Selain itu, penulis juga menjelaskan tentang dampak dari kesalahan model yang diterapkan dalam melakukan reformasi birokrasi tersebut.

Model birokrasi Weberian yang diadopsi dari cara kerja mesin oleh Max Weber, bagaikan pisau bermata dua, yang pada satu sisi bisa meningkatkan kinerja birokrasi, namun disisi lain akan menurunkan kinerja organisasi. Menurut penulis, hubungan antara birokratisasi (penerapan prinsip-prinsip birokrasi seperti spesialisasi, formalisasi aturan, dsb) dengan kinerja organisasi tidak berbentuk linear dimana semakin tinggi

penerapan birokratisasi maka semakin bagus kinerja organisasi. Tetapi sebaliknya, hubungan birokratisasi dengan kinerja organisasi tersebut berbentuk parabola. Ada titik optimalitas penerapan birokratisasi, dan apabila birokratisasi sudah mencapai titik optimal, namun terus ditingkatkan, malah akan menurunkan kinerja birokrasi.

Kinerja Reformasi Birokrasi

Belum optimalnya kinerja reformasi birokrasi juga terlihat dari potret birokrasi aparatur daerah yang masih buruk. Menurut penulis, reformasi birokrasi aparatur daerah memiliki hubungan dengan sejarah proses desentralisasi di Indonesia. Buruknya birokrasi dan kinerja aparatur di daerah salah satunya dipengaruhi karena sejarah desentralisasi yang terjadi bukan dari inisiatif pemerintah pusat, tetapi justru karena tekanan publik pada masa orde baru. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai anomali dan paradoks dalam pengelolaan aparatur daerah seperti terjadinya *elite captures* dalam penganggaran, politisasi birokrasi, dan persebaran perilaku koruptif di daerah.

Kesalahan dalam penerapan reformasi birokrasi akan berdampak pada banyak hal, salah satunya adalah munculnya berbagai patologi/ penyakit birokrasi seperti birokrasi paternalistik, pembengkakan anggaran, pembengkakan birokrasi, prosedur yang berlebihan atau berbelit-belit. Dampak lain yang cukup marak terjadi adalah munculnya praktek-praktek korupsi. Bahkan penulis berpendapat bahwa birokrasi yang buruk sebagai mesin produksi dari praktek korupsi yang menjamur di Indonesia.

Reformasi Birokrasi Kontekstual

Oleh karena itu, untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang benar, perlu dilakukan perubahan mendasar pada peraturan perundangan-undangan, struktur, sistem kepegawaian, budaya birokrasi dan sistem akuntabilitas publik. Sehingga dibutuhkan visi reformasi birokrasi yang holistik dan terintegrasi disertai dengan konsistensi dan kontinuitas dalam menerapkan reformasi birokrasi. Kemudian, juga perlu penguatan peran dari Pusat Pengembangan dan Pengendalian Kebijakan Reformasi Birokrasi yang di Indonesia dimandatkan kepada Kemen PAN & RB. Kemen PAN & RB perlu memaksimalkan keberadaan LAN sebagai *thin thank* dalam perumusan kebijakan reformasi birokrasi.

Penulis resensi : Masrully, S.IP. (Pengelola Kajian di PKP2A I LAN)